

PENDIDIKAN UNTUK PEREMPUAN: KUNCI PEMBERDAYAAN DAN KESETARAAN GENDER

Mutia munawwarah¹, Emma Ninta Charina Br Sitepu², Cut Kumala Sari³

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Samudra, Langsa

E-mail : miyuuttute@gmail.com¹

ABSTRAK

Kabut asap merupakan permasalahan yang sering terjadi di Sumatera Selatan yang dampaknya signifikan untuk kesehatan, ekonomi dan lingkungan. Penggunaan data mining menjadi kunci dalam mengidentifikasi pola hubungan asosiatif dalam data bencana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan algoritma FP-Growth dalam menganalisis data bencana kabut asap di Sumatera Selatan. Dengan fokus pada identifikasi pola kombinasi datasets, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terhadap faktor-faktor penyebab dan pola terjadinya kabut asap. Melalui penerapan metode penelitian yang sesuai, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana kabut asap di Sumatera Selatan.

Kata kunci

Pendidikan perempuan, pemberdayaan, kesetaraan gender, inklusi, kebijakan pendidikan

ABSTRACT

Education is the main foundation in efforts to create a just and equal society, especially in the context of women's empowerment and the elimination of gender inequality. This article discusses the strategic role of education in improving the quality of life of women, opening access to economic and political opportunities, and encouraging active participation in development. Through a descriptive qualitative approach, this paper examines data and policies related to women's education in Indonesia and globally. The results of the discussion show that inclusive and gender-responsive education can reduce poverty rates, delay the age of marriage, and reduce violence against women. However, there are still various challenges such as patriarchal cultural norms, limited access in remote areas, and gender bias in the education curriculum. Therefore, there needs to be a policy that supports gender-sensitive education, teacher training, and comprehensive community involvement. Education for women is not only a right, but also the key to creating an independent, critical, and empowered generation in building an equal society.

Keywords

women's education, empowerment, gender equality, inclusion, education policy

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Namun, perempuan di berbagai belahan dunia masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan. Padahal, pendidikan memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan menciptakan kesetaraan gender yang berkelanjutan. Artikel ini mengulas pentingnya pendidikan bagi perempuan, tantangan yang dihadapi, serta dampak positif dari investasi pendidikan terhadap perempuan.

Pada dasarnya, pendidikan merupakan elemen penting dalam pembangunan peradaban, karena ia berfokus pada pengembangan manusia. Pendidikan memiliki peran vital bagi setiap individu, berfungsi untuk mengangkat martabat dan harkat mereka. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan pun mengalami pertumbuhan yang

cepat dan dinamis. Kedatangan agama Islam di Indonesia membawa pengaruh besar, mengubah pola dan sistem pendidikan yang sebelumnya telah ada, yang pada masa Hindia-Belanda, lebih diperuntukkan bagi kalangan bangsawan. Pada awal abad ke -20, pola pendidikan mulai berubah di Indonesia. Sistem yang digunakan selama periode ini memiliki tujuan yang berbeda sejak dikembangkan menjadi era industri Belanda dan membutuhkan banyak tugas pelatihan. Kemudian masyarakat nasionalisme dimulai. Pada saat itu, orang Indonesia mulai mendidik diri mereka sendiri di tempat-tempat di mana ini diingatkan oleh kebangkitan bangsa. Peraturan dari rezim kolonial Belanda telah mulai meningkatkan kesadaran publik. Ini sudah dianggap politik etis (Wahidah & Ali, 2017).

Wacana yang menarik dan diskusi wanita tanpa akhir. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perempuan memiliki sedikit "kelas atas", tetapi dalam kaitannya dengan semua masalah yang merujuk pada wanita yang dilestarikan dalam posisi yang biasanya dicapai oleh pria, peran, posisi dan kesetaraan dengan pria masih merupakan topik yang sangat kontroversial. Memahami periode pra-pengembangan abad ke-20 memungkinkan wanita untuk bersamaan dengan pria dalam segala keadaan, terutama pendidikan. Wanita dilarang dari interaksi sosial dan pendidikan (Mustikawati, 2013).

Menurut laporan UNESCO (2022), sekitar 129 juta anak perempuan di dunia tidak bersekolah, baik di SD, SMP, maupun SMA. Ketidaksetaraan ini bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga hambatan serius bagi pembangunan berkelanjutan, tetapi juga penghambat signifikan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pendidikan untuk perempuan terbukti secara signifikan mampu meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga, dan komunitas. World Bank (2018) mencatat bahwa setiap tambahan satu tahun pendidikan bagi perempuan dapat meningkatkan penghasilannya hingga 10%, serta menurunkan angka kematian anak dan memperbaiki kesehatan keluarga. Di Indonesia sendiri, meskipun akses terhadap pendidikan terus membaik, kesenjangan masih terlihat terutama di daerah tertinggal, pedesaan, dan wilayah dengan budaya yang kuat membatasi ruang gerak perempuan. Data Badan Pusat Statistik (2020) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah perempuan, khususnya di kelompok usia 16–18 tahun, masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, terutama karena faktor ekonomi dan sosial seperti pernikahan dini dan beban pekerjaan rumah tangga.

Dengan demikian, pendidikan untuk perempuan bukan hanya soal akses, tetapi juga soal keadilan sosial dan pemberdayaan. Melalui pendidikan yang setara dan berkualitas, perempuan dapat memperoleh kekuatan untuk membuat keputusan, memperjuangkan haknya, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Artikel ini akan mengulas lebih lanjut tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan, hambatan yang dihadapi, serta strategi untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender melalui pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yang membantu (saat ini) memecahkan masalah nyata dan menyajikan beberapa solusi yang mungkin (saat ini) untuk menyelesaikan klasifikasi, analisis, dan interpretasi. Kutha (2010: 30) menyatakan bahwa metode analisis deskriptif dilakukan dengan menjelaskan fakta. Fakta berlanjut dari analisis tidak hanya dengan penjelasan tetapi juga dengan pemahaman dan penjelasan yang cukup. Studi ini melibatkan metode perekaman data

dalam penelitian perpustakaan di mana para peneliti mengumpulkan data melalui jurnal, penelitian dan analisis, dan objek penelitian yang mendukung penelitian seperti foto, gambar, dokumen elektronik, dan sumber lain, dan metode perekaman data dalam penelitian perpustakaan di mana para peneliti mengumpulkan data melalui membaca, penelitian dan analisis, serta sumber lain, dan objek penelitian yang mendukung penelitian, seperti foto, gambar, gambar, gambar, dan gambar elektronik, seperti foto, seperti gambar, dan gambar elektronik, seperti gambar, dan gambar listrik, seperti gambar, dan gambar. Penelitian Sastra.

Sugiyono (2016:291) berkaitan dengan penelitian teoritis dan referensi lainnya untuk nilai-nilai, budaya dan norma yang dikembangkan dalam konteks sosial. Sangat penting dalam melakukan penelitian. Data yang diperoleh dari informasi tentang topik yang akan dianalisis dapat diperoleh dari tinjauan literatur dari sumber lain seperti buku, artikel, jurnal, dan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan perempuan Indonesia pada abad XIX dipengaruhi oleh perkembangan gerakan perempuan di dunia. Di Indonesia, pengaruh ini tampak dalam keragaman ideologi yang tumbuh pada masa nasionalisme. Pada masa kolonial, pendidikan sangat terbatas hanya untuk orang Belanda dan kaum priyayi, sedangkan perempuan pribumi umumnya tidak memperoleh akses pendidikan. Tradisi dan budaya setempat menempatkan perempuan sebagai "the second sex", yang hanya bertugas di ranah domestik.

Kesadaran akan ketidakadilan gender memicu perlawanan dari perempuan terdidik. Gerakan emansipasi wanita dipelopori oleh R.A. Kartini, yang melalui tulisan-tulisannya menuntut persamaan hak pendidikan bagi perempuan. Kartini menyoroti pentingnya pendidikan sebagai kunci kemajuan perempuan dan bangsa. Perjuangan Kartini kemudian menginspirasi munculnya Kelompok-kelompok wanita yang berjuang untuk hak-hak perempuan, tidak hanya dalam aspek pendidikan, tetapi juga di ranah sosial, politik, dan kebudayaan.

Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk mengakses pendidikan. Data menunjukkan jumlah siswa laki-laki dan perempuan di tingkat pendidikan nasional sudah relatif seimbang, menandakan berkurangnya diskriminasi berbasis gender dalam akses pendidikan. Terdapat perubahan pola pikir masyarakat mengenai pendidikan perempuan. Jika dahulu perempuan dianggap tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi, kini semakin banyak perempuan yang bersekolah hingga jenjang tinggi.

Selain itu Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan undang-undang, seperti UU No. 7 Tahun 1994 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita dan UU No. 34 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak perempuan untuk memperoleh pendidikan sehingga perempuan berhak menentukan pendidikannya. Meskipun akses pendidikan sudah lebih setara, masih terdapat tantangan berupa marginalisasi, stereotip, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan. Stereotip peran gender masih cukup kuat, misalnya anggapan bahwa urusan rumah

tangga sepenuhnya tanggung jawab perempuan, atau perempuan dianggap tidak layak menjadi pemimpin.

Pendidikan merupakan kunci untuk mengubah pola pikir dan struktur sosial yang selama ini menempatkan perempuan di posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki. Melalui pendidikan, perempuan dapat mengembangkan potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Pendidikan yang setara juga menjadi landasan terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai konvensi internasional dan menerbitkan regulasi nasional untuk mendukung kesetaraan gender, baik dalam bentuk undang-undang maupun program pemerataan pendidikan. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam menghapus diskriminasi dan memberikan hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

a. Pentingnya Pendidikan bagi Perempuan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu, termasuk perempuan. Dalam konteks global dan nasional, pendidikan bagi perempuan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup, baik secara individu maupun kolektif. Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki akses pendidikan cenderung lebih sehat, memiliki penghasilan lebih baik, serta mampu mengambil keputusan dalam kehidupan pribadi dan publik.

Menurut data UNESCO (2022), setiap tambahan satu tahun pendidikan bagi perempuan dapat meningkatkan pendapatan mereka sebesar 10–20%. Selain itu, perempuan yang berpendidikan juga cenderung menunda usia pernikahan dan memiliki jumlah anak yang lebih sedikit, yang berdampak langsung pada kesehatan ibu dan anak.

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah perempuan telah menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah atas untuk perempuan mencapai 80,12%, sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki yaitu 78,45%. Namun, tantangan masih besar dalam hal kualitas pendidikan, akses di daerah terpencil, serta norma sosial yang membatasi peran perempuan.

b. Pendidikan sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan

Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga menjadi alat penting dalam proses pemberdayaan perempuan. Dengan pendidikan, perempuan dapat memiliki kepercayaan diri, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Perempuan yang terdidik lebih mampu mengekspresikan pendapatnya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memperjuangkan hak-haknya. Dalam dunia kerja, pendidikan memberikan peluang bagi perempuan untuk masuk ke sektor-sektor yang sebelumnya didominasi laki-laki. Hal ini berdampak pada meningkatnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Contoh nyata terlihat dalam program pemberdayaan perempuan di berbagai daerah di Indonesia, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan kegiatan pendidikan non-formal untuk ibu rumah tangga, yang memberikan pelatihan keterampilan ekonomi. Namun demikian, tantangan seperti diskriminasi berbasis gender, kekerasan terhadap perempuan, dan bias kurikulum masih menjadi penghalang dalam pencapaian pendidikan yang adil dan setara.

c. Kesetaraan Gender Melalui Pendidikan Inklusif

Kesetaraan gender hanya dapat dicapai jika pendidikan bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan gender. Ini berarti pendidikan harus bebas dari stereotip gender, memastikan lingkungan yang aman bagi semua gender, dan melibatkan perempuan dalam perumusan kebijakan pendidikan. Pendidikan yang berperspektif gender juga mencakup pelatihan guru agar mampu memahami isu-isu gender, penyediaan fasilitas yang ramah perempuan (seperti toilet yang aman dan layak), serta kurikulum yang mempromosikan kesetaraan.

Lembaga seperti UN Women dan UNICEF mendorong kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, termasuk kampanye anti-bullying dan pendidikan seksualitas yang komprehensif. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan, terutama di daerah pedesaan dan kawasan timur Indonesia.

d. Rekomendasi Kebijakan dan Aksi Nyata

Untuk meningkatkan pendidikan bagi perempuan, beberapa rekomendasi yang dapat diambil antara lain:

- 1) Peningkatan Akses: Pemerintah perlu memperluas jangkauan pendidikan ke wilayah terpencil dan menyediakan beasiswa khusus untuk perempuan dari keluarga miskin.
- 2) Pendidikan Sensitif Gender: Perlu adanya pelatihan guru dan revisi kurikulum untuk menghilangkan bias gender dalam materi ajar.
- 3) Pemberdayaan Komunitas: Melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan keluarga dalam mendorong pendidikan perempuan, terutama di wilayah dengan budaya patriarki yang kuat.
- 4) Perlindungan dari Kekerasan: Menyediakan perlindungan dan layanan bagi anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan pernikahan dini.

4. KESIMPULAN

Pendidikan di Indonesia kini menunjukkan kemajuan dalam kesetaraan gender. Jumlah siswa laki-laki dan perempuan di pendidikan nasional hampir seimbang, mengurangi diskriminasi gender. Perubahan pola pikir masyarakat tentang pendidikan perempuan telah terjadi, di mana semakin banyak perempuan mengejar pendidikan tinggi. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai undang-undang yang menjamin hak perempuan atas pendidikan.

Meski akses pendidikan lebih setara, tantangan seperti marginalisasi, stereotip, dan kekerasan terhadap perempuan tetap ada. Stereotip umum masih kuat, misalnya, anggapan bahwa urusan rumah tangga adalah tanggung jawab perempuan semata. Pendidikan sangat penting untuk mengubah pandangan dan struktur sosial ini, sehingga perempuan bisa berkembang, percaya diri, dan berkontribusi dalam pembangunan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. M. (2020). Kesetaraan Gender Sebagai Kunci Aisyyah. *In Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*.
- Fakih, M. (2017). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar .

- Gultom, M. (2021). Indikator kesetaraan gender dan isu-isu gender di bidang pendidikan. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2(1), 1-8.
- Mustikawati, C. (2013). *Emansipasi Wanita Dalam Pemikiran RA Kartini (Studi Hermeneutiko Makna Emansipasi Wanita Dalam Buku Habis Gelap Terbitlah Terang) (Doctoral dissertation) Universitas Komputer Indonesia*.
- Raharjo, S. (2019). Pendidikan sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 3, 45-56.
- Saptandari, A. (2015). Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1, 12-23.
- Sari, A. L. (2021). UMKM, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 1, 22-32.
- Sembiring, T. (2017). Pendidikan dan Kesetaraan Gender: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Studi Gender*, 4, 45-60.
- Sugitanata, A. H. (2024). Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan Islam Progresif Suud Sarim Karimullah: Analisis Strukturalisme dan Implikasinya. *Muadalah* , 1-13.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian dan (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Sumar, W. W. (2015). Implementasi kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 7, 158-182.
- Wahidah, M. &. (2017). Pemikiran Raden Ajeng Kartini tentang Pendidikan Perempuan dan Relevansinya terhadap Pendidikan Islam Profetik. *Jurnal Studi Islam*, 18, 36-47.